



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD RUSMAWARDI
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT
3. NHK : 718274

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 280.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/170 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 372 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 374 m2 di KOTAWARINGIN BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 86.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1,5 S Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, HONDA NC12A1CF A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 25U Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. LAINNYA, POLYGON - Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 368.000.000

III. HUTANG Rp. 160.325.656

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 207.674.344



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.